

RINGKASAN

Keterlibatan atau partisipasi warga negara perlu untuk setiap permasalahan pembangunan yang ingin ditangani oleh pemerintah. Pembangunan yang diwarnai dengan perubahan pesat serta dinamis mendorong terjadinya penyesuaian dari para penyelenggara pemerintahan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk sensitif terhadap misi utamanya dalam mewujudkan kepentingan publik. Pada kondisi ini, diperlukan keterlibatan warga negara dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang semakin kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang baik dan konkret termasuk persoalan permasalahan pengelolaan sampah. Upaya melibatkan warga negara dalam pengelolaan permasalahan sampah daerah diwujudkan melalui program bank sampah. Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah yang menerapkan program bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah masih berada pada tingkat partisipasi rendah yaitu *consultation*. Kabupaten Banyumas perlu menggerakkan partisipasi masyarakat agar mampu mencapai tujuan pengelolaan sampah daerah melalui program bank sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat termasuk kondisi-kondisi yang menentukan dan meningkatkan partisipasi serta memberikan solusi terhadap masalah partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kabupaten Banyumas. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pemilihan informan *purposive sampling*. Data dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis interaktif dengan teknik triangulasi sebagai validitas data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam keempat bank sampah yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Bank Sampah Inti Barokah, Moro Kranji, Hamberkahi, dan Wartinem pada pengambilan keputusan tergolong pasif dan kurang memfasilitasi ruang diskusi interaktif serta edukasi; pada pelaksanaan, kontribusi berupa tenaga dan informasi tetapi belum sepenuhnya, terkendala koordinasi pengurus dan pemerintah serta penurunan antusiasme masyarakat; pada pemanfaatan hasil sudah terlibat dalam manfaat materi, sosial, dan pribadi; serta pada evaluasi, keterlibatan masyarakat belum optimal diikutsertakan dana forum dan diskusi evaluasi baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga partisipasi keempat bank sampah berada pada kelompok *degrees of tokenism*. Kondisi-kondisi yang menentukan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kabupaten Banyumas adalah norma kerelawanan berupa insentif dan penghargaan; jejaring sosial berupa pemaparan hasil penjualan sampah dan diskusi internal evaluasi; konteks interpersonal promosi program berupa peran aktif ketua bank sampah dan kecakapan pengurus; serta dukungan pemerintah berupa ruang diskusi komunikatif interaktif, koordinasi pemerintah desa bersama masyarakat serta dukungan pemerintah dalam peninjauan ulang program yang melibatkan saran, masukan, dan kritik.

Kata Kunci : Partisipasi Publik, Pengelolaan Sampah, Program Bank Sampah

SUMMARY

The involvement or participation of citizens is necessary for every development problem that the government wants to handle. Development characterized by rapid and dynamic changes encourages adjustments from government administrators. The government has a responsibility to be sensitive to its main mission in realizing the public interest. In this condition, the involvement of citizens is needed in answering community problems that are increasingly complex and require good and concrete solutions, including the problem of waste management. Efforts to involve citizens in managing regional waste problems are realized through the waste bank program. Banyumas Regency as one of the regions that implements the waste bank program as an effort to manage waste is still at a low level of participation, namely consultation. Banyumas Regency needs to mobilize community participation in order to be able to achieve regional waste management goals through the waste bank program.

This study aims to determine community participation including the conditions that determine and increase participation and provide solutions to the problem of community participation in the waste bank program in Banyumas Regency. The research was conducted using qualitative methods with purposive sampling informant selection techniques. The data collected includes primary and secondary data with data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation. The data analysis method uses interactive analysis with triangulation techniques as data validity.

The results of this study indicate that the form of community participation in the four waste banks in Banyumas Regency, namely the Inti Barokah, Moro Kranji, Hamberkahi, and Wartinem Garbage Banks in decision making is classified as passive and does not facilitate interactive discussion and education; in implementation, the contribution is in the form of manpower and information but not yet fully, constrained by the coordination of the management and the government as well as a decrease in the enthusiasm of the people; on the utilization of the results already involved in material, social, and personal benefits; as well as in the evaluation, the involvement of the community has not been optimal, including forum funds and evaluation discussions, both directly and indirectly. So that the participation of the four waste banks is in the degrees of tokenism group. The conditions that determine community participation in the waste bank program in Banyumas Regency are volunteer norms in the form of incentives and rewards; social networks in the form of exposure to the results of selling waste and internal evaluation discussions; the interpersonal context of program promotion in the form of the active role of the head of the waste bank and the skills of the management; as well as government support in the form of interactive communicative discussion rooms, village government coordination with the community and government support in reviewing programs that involve suggestions, input, and criticism.

Keywords : Public Participation, Waste Management, and Waste Bank Program